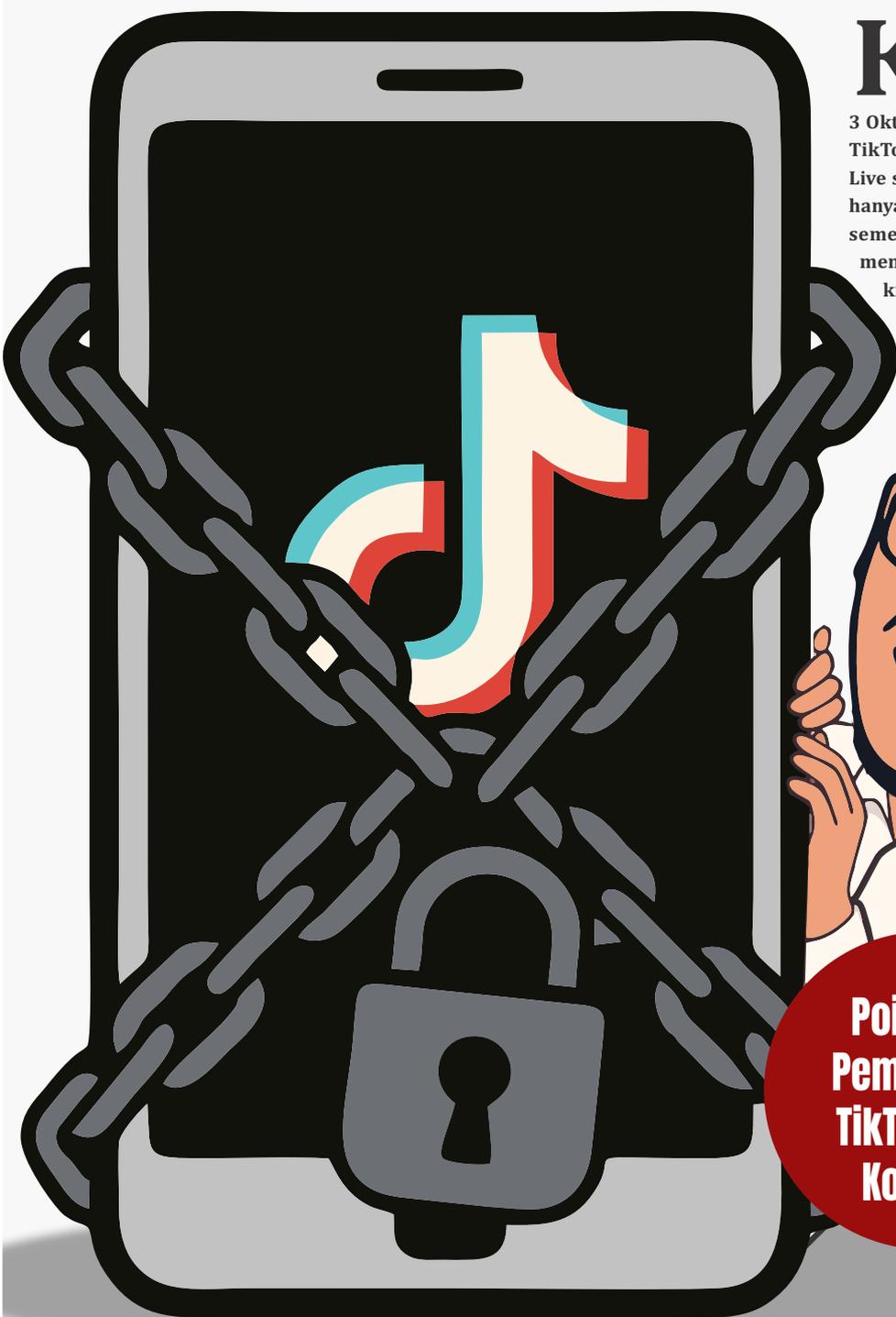


# PEMBEKUAN SINGKAT TIKTOK, KETEGASAN ATAU TEGURAN?



**K**ementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia sempat mengeluarkan keputusan membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) TikTok Pte. Ltd pada 3 Oktober 2025 sontak memicu perhatian publik. Langkah ini diambil karena TikTok dinilai belum memenuhi kewajiban menyerahkan data aktivitas TikTok Live serta monetisasi di Indonesia. Namun, pembekuan ini bak drama karena hanya berlangsung singkat, Sabtu (4/10/2025) Komdigi mencabut pembekuan sementara tersebut setelah platform TikTok memenuhi kewajiban untuk menyampaikan data yang diminta oleh pemerintah. Kebijakan pembekuan kilat diklaim sebagai ketegasan pemerintah bahwa kepatuhan terhadap regulasi tidak bisa ditawar, meski platform sebesar TikTok sekalipun. Di sisi lain, aneka komentar muncul dari netizen terkait kebijakan tersebut mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut, bahkan dinilai sebagai drama singkat. Pernyataan pun muncul apakah benar-benar memberikan efek jera, atau justru sekadar “shock therapy” agar platform digital lebih disiplin memenuhi aturan negara? Yang jelas, kasus ini menjadi babak baru hubungan pemerintah dengan raksasa teknologi global di tanah air.

**BACA HAL 11...**

## Poin-Poin Pembekuan TikTok oleh Komdigi

### 1. Pembekuan

Pembekuan dilakukan pada 3 Oktober 2025.

### 2. Alasan Pembekuan

- TikTok dinilai belum memenuhi kewajiban penyerahan data kepada pemerintah.
- Data yang diminta mencakup aktivitas TikTok Live, monetisasi, serta indikasi pelanggaran konten.

### 3. Bentuk Sanksi

- Status izin TikTok sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dibekukan sementara.
- Meski dibekukan, aplikasi TikTok masih bisa diakses pengguna.

### 4. Respons TikTok

- TikTok menyatakan siap bekerja sama dan segera menyerahkan data yang diminta.

### 5. Pemenuhan Kewajiban

- TikTok menyerahkan data berupa rekap traffic, nilai monetisasi, dan laporan pelanggaran untuk periode tertentu.

### 6. Pencabutan Pembekuan

- Komdigi mencabut pembekuan 4 Oktober 2025, karena menilai kewajiban sudah dipenuhi.
- Status izin TikTok kembali aktif.

“**K**epemimpinan di TNI harus kepemimpinan keteladanan, harus kepemimpinan Ing Ngarso Sung Tulodo, harus memberi contoh di depan. Tidak ada tempat untuk pemimpin-pemimpin yang tidak kompeten, yang tidak profesional, yang tidak mengerti tugasnya,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo memberikan penekanan khusus kepada Panglima TNI dan para Kepala Staf Angkatan agar menilai para pemimpin di lingkungan TNI berdasarkan prestasi, bukan senioritas. Kepala Negara menegaskan bahwa semangat meritokrasi harus menjadi dasar dalam pembinaan kepemimpinan TNI, agar organisasi tetap tangguh dan adaptif terhadap tantangan zaman.

“Prajurit kita berhak dan menuntut kepemimpinan yang terbaik. Saya memberi izin kepada Panglima TNI dan Kepala Staf, dalam rangka seleksi kepemimpinan tidak perlu terlalu memperhitungkan senioritas, yang penting prestasi, pengabdian, cinta tanah air,” ungkap Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya peran TNI dalam menjaga kekayaan alam Indonesia dari ancaman pihak asing maupun pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kepala Negara mengingatkan bahwa sumber daya alam Indonesia adalah aset strategis yang harus dijaga demi kesejahteraan rakyat.

“TNI harus introspeksi diri. Dengan semua organisasi yang kita miliki, TNI harus tanggap, TNI harus bantu penegak hukum, TNI harus bantu pemerintah daerah dan pusat untuk menjaga kekayaan kita, sumber daya alam kita. Kekayaan kita harus kita selamatkan, harus kita hemat, harus kita kelola untuk menghilangkan kemiskinan dari bangsa Indonesia,” ucap Presiden.

Dalam amanatnya, Presiden Prabowo juga mengapresiasi peran aktif TNI dalam mendukung pembangunan nasional. Kepala Negara berpesan agar prajurit TNI terus belajar dan beradaptasi dengan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi modern, termasuk teknologi siber dan kecerdasan buatan.

“Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, jangan berhenti berlatih, jangan berhenti belajar. Saya perintahkan Panglima TNI, Kepala Staf, kaji terus perkembangan teknologi dan sains, kaji terus organisasi, bila perlu organisasi yang usang diganti dengan organisasi yang tepat untuk kepentingan bangsa Indonesia,” ujar Presiden.

Menutup amanatnya, Presiden Prabowo kembali menyampaikan

# PRESIDEN : KEPEMIMPINAN TNI BUKAN BERDASARKAN SENIORITAS

**Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya kepemimpinan yang berlandaskan keteladanan, profesionalisme, dan bukan berdasarkan senioritas dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam amanatnya saat bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI yang digelar di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Minggu (5/9/2025).**



Presiden RI Prabowo Subianto bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI yang digelar di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada Minggu (5/9/2025).

ucapan selamat ulang tahun kepada seluruh prajurit dan keluarga besar TNI. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada para istri dan keluarga prajurit yang senantiasa mendukung tugas pengabdian suami mereka di lapangan.

“Sekali lagi, Dirgahayu ke-80 TNI, selamat bertugas, selamat menjalankan amanah mulia untuk rakyat, bangsa, dan negara. Saya juga ucapkan terima kasih kepada istri-istri para prajurit, kepada anak-anak para prajurit yang dengan tabah, dengan setia mendukung suami-suaminya, dengan setia merawat anak-anaknya selama suaminya bertugas di tempat-tempat yang berbahaya,” tutur Presiden Prabowo seraya menutup amanatnya dengan doa agar Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi para prajurit dan keluarga besar TNI.

Selepas rangkaian upacara, Presiden Prabowo menyaksikan demonstrasi pasukan TNI, defile pasukan, dan pawai alat utama sistem senjata (alutsista) TNI. Dari mimbar kehormatan, Presiden Prabowo tampak antusias menyaksikan berbagai atraksi yang menampilkan kesiapsiagaan dan profesionalisme prajurit dari matra darat, laut, dan udara. Suara gemuruh kendaraan

tempur, helikopter, hingga pesawat tempur yang melintas di langit Jakarta menambah kemegahan suasana.

Deru mesin pesawat tempur terdengar di langit Jakarta, menandai dimulainya rangkaian pertunjukan militer yang menjadi puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Dari mimbar kehormatan, Presiden Prabowo menyaksikan atraksi para prajurit. Kepala Negara tampak serius memperhatikan setiap manuver dan gerakan yang ditampilkan pasukan. Suasana Monas berubah menjadi panggung kolosal yang memadukan kekuatan darat, laut, dan udara.

Demonstrasi dimulai dengan aksi udara pesawat F-16, disusul manuver kendaraan tempur, bela diri militer, hingga serbuan pasukan berkuda. Para prajurit juga menampilkan simulasi pembebasan sandera dan penanggulangan bencana alam, menggambarkan kesiapan TNI dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman dan tugas kemanusiaan.

Aksi lintas udara Victory Jump dan pengibaran bendera Merah Putih menjadi penutup demonstrasi yang menggetarkan hati. Langit Jakarta kembali bergemuruh saat pesawat-pesawat tempur melakukan high

speed pass, melintas rendah di atas Monas sebagai simbol kejayaan dan kesiapsiagaan TNI.

Usai menyaksikan demonstrasi, Presiden Prabowo juga menyaksikan defile pasukan TNI yang melintas di hadapannya. Langkah tegap 133 ribu personel dan irama gendang drumben dari berbagai kesatuan dan lembaga pendidikan membuka jalannya defile. Barisan demi barisan pasukan lintas matra tampil gagah mulai dari Polisi Militer, Wanita TNI, Paspampres, Kopassus, Kostrad, Marinir, hingga Korps Kadet Indonesia menunjukkan kekompakan dan kedisiplinan yang menjadi ciri khas prajurit Indonesia.

Dari udara, pesawat pembawa Nusantara Flag melintas gagah, diikuti formasi pesawat militer yang membentuk angka “80” di langit biru. Sorak-sorai masyarakat yang memadati area Monas menambah semarak suasana, menciptakan momen kebanggaan nasional yang tak terlupakan.

Presiden Prabowo tampak beberapa kali memberi hormat kepada barisan pasukan yang melintas. Tatapan Kepala Negara tegas namun hangat, menyiratkan kebanggaan atas dedikasi dan pengorbanan para prajurit TNI. (rls/lut)



Borobudur salah satu cagar budaya yang ada di Indonesia. (Ist)

# DPR : CAGAR BUDAYA TERANCAM HANCUR?

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI khawatir kekayaan cagar budaya Indonesia terancam hancur. Untuk itu, Komisi X meminta pemerintah dalam hal ini Kementerian Kebudayaan untuk menata tata kelola, riset yang memadai, menerapkan strategi konkret, dan melestarikan cagar budaya sehingga mampu bersaing dengan situs global.

**A**nggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mengatakan kegagalan dalam menyediakan riset yang memadai dan kerangka regulasi yang kokoh membuat kekayaan budaya nasional terancam hancur.

Fikri membandingkan pengelolaan cagar budaya di Indonesia, seperti Borobudur, dengan situs dunia seperti Hagia Sophia atau Aya Sofia di Turki dan Alhambra di Spanyol. Ia menyebut situs global berhasil menciptakan narasi keunggulan yang didukung riset berbiaya tinggi, sehingga menghasilkan pendapatan finansial yang besar.

"Situs global berhasil menciptakan narasi keunggulan yang membuat cagar budaya menjadi aset yang bernilai jual dan menghasilkan pendapatan finansial yang besar," ungkap Fikri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (5/10/2025).

Ia mencontohkan, kunjungan wisatawan ke Aya Sofia jauh melampaui batas kunjungan Borobudur (1.200 orang/hari) yang dibatasi demi konservasi. Fikri menekankan, tanpa riset yang cukup, narasi kekayaan budaya hanya akan menjadi sekadar slogan.

Dalam konteks cagar budaya di Indonesia, Fikri menyoroti dua masalah utama pada kerangka regulasi dan anggaran. Dari dua masalah tersebut kemudian dijabarkan menjadi sejumlah poin.

Pertama, mandat hukum yang tidak dijalankan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya mengamanatkan pembentukan Badan Pengelola di Pasal 97, tetapi amanat ini tidak pernah dilaksanakan selama 15 tahun (hingga 2025). Kondisi ini menciptakan kelemahan tata kelola yang serius.

Kedua, kewenangan pemerintah daerah kabur. Tidak adanya mandat formal yang kuat dari pusat membuat Pemerintah Daerah (Pemda) sulit untuk membentuk Dinas Kebudayaan atau mengalokasikan anggaran.

"Akibatnya, banyak Pemda

menggabungkan Dinas Kebudayaan dengan dinas lain. Kelemahan kewenangan ini berdampak pada intervensi daerah," jelas legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) ini.

Ketiga, anggaran yang tidak proporsional. Alokasi anggaran untuk Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) dinilai tidak proporsional dan cenderung menurun.

Selain itu, Fikri juga mendesak agar konsep daya dukung dan daya tampung lingkungan (carrying capacity) menjadi pengarusutamaan dalam konservasi. Ia memperingatkan bahwa tanpa kajian teknokratis yang rinci, cagar budaya akan hancur akibat eksploitasi berlebihan.

"Pelestarian cagar budaya wajib disertai dengan rencana daya dukung dan daya tampung lingkungan (carrying capacity). Tanpa adanya rencana tersebut cagar budaya akan hancur," tegas Fikri.

Ia menekankan, perlu ada keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan prinsip konservasi, di mana pembatasan jumlah pengunjung (seperti di Borobudur) merupakan salah satu upaya menjaga daya dukung lingkungan.

Fikri mendesak agar masalah kewenangan ini segera diselesaikan, termasuk dengan memberi masukan kepada Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU Pemda), agar Pemda memiliki peran dan peduli terhadap eksistensi budaya.

Sementara itu, musisi sekaligus anggota DPR, Melly Goeslaw prihatin terhadap maraknya kerusakan cagar budaya akibat alih fungsi lahan dan pembangunan infrastruktur. Untuk itu, ia menuntut strategi konkret dari Kementerian Kebudayaan untuk menanggulangi persoalan ini.

"Apa strategi yang konkret dari Kementerian Kebudayaan untuk mengatasi kerusakan lahan akibat pembangunan infrastruktur dan alih fungsi lahan?" tanya Melly dalam rapat dengar pendapat Komisi X bersama panitia kerja (Panja) pelestarian cagar budaya, Kamis (2/10/2025).

Tidak hanya menyoroti Kementerian Kebudayaan, istri musisi Anto Hoed itu juga menyoroti pentingnya peran Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam melestarikan cagar budaya melalui teknologi.

"Kami berharap BRIN punya cara pemutakhiran data dan peta risiko kerusakan cagar budaya. Sudah saatnya teknologi digitalisasi dipakai untuk pelestarian," tegasnya dilansir Beritasatu.

Melly Goeslaw mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menyediakan data statistik kebudayaan yang komprehensif, sebagai dasar kebijakan berbasis data dalam pengelolaan cagar budaya.

"Cagar budaya harus dilihat punya kontribusi terhadap peningkatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini bisa berdampak langsung ke ekonomi masyarakat," ujarnya.

Melly Goeslaw juga berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan pelestarian budaya agar tidak hanya dilindungi secara hukum, tetapi juga dirawat dan dimanfaatkan untuk rakyat.

"Kami ingin cagar budaya benar-benar terpelihara, bukan sekadar simbol. Ini warisan penting untuk generasi yang akan datang," tutupnya.

Sedangkan, Anggota Komisi X DPR RI, Eva Stevany Rataba mengatakan pelestarian cagar budaya adalah fondasi dalam menjaga identitas bangsa dan memperkuat daya saing budaya nasional. Untuk itu, sinergi kebijakan, penguatan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat harus menjadi prioritas bersama.

"Dengan langkah terarah, dukungan anggaran, dan koordinasi lintas sektor, pelestarian cagar budaya dapat menjadi salah satu pilar utama pembangunan nasional berbasis kebudayaan," kata Eva dikutip dari NasDem.

Eva mengatakan, hambatan yang dihadapi BPK di Indonesia adalah minimnya kolaborasi pemerintah pusat, daerah, swasta, dan perorangan, dalam pengelolaan pelestarian cagar

budaya.

"Belum lagi keterbatasan kualitas sumber daya manusia, tenaga ahli cagar budaya, baik itu juru pugar, juru pelihara. Belum lagi keterbatasan anggaran, sementara kebutuhan banyak, belum lagi insentif bagi pemilik cagar budaya," tandasnya.

Selain itu, kata Eva, hal lain yang menjadi hambatan ialah kurangnya kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat untuk pemeliharaan cagar budaya, sehingga masih sering terjadi pengrusakan cagar budaya maupun objek diduga cagar budaya (ODCB).

"Kepemilikan lahan cagar budaya yang masih milik individu ini masih minim pengelolannya, dan masih banyak permasalahan maupun hambatan lainnya," imbuhnya. (rls,ist/lut)



Situs global berhasil menciptakan narasi keunggulan yang membuat cagar budaya menjadi aset yang bernilai jual dan menghasilkan pendapatan finansial yang besar,"

**Abdul Fikri Faqih**

Anggota Komisi X DPR RI,

# ADU ARGUMEN PURBAYA & BAHLIL SOAL KILANG PERTAMINA HINGGA LPG

Adu argumen antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mencuat lagi. Usai terkait data gas minyak cair atau liquified petroleum gas (LPG) 3 kg, terbaru keduanya saling sahut-menyahut mengenai kilang milik PT Pertamina (Persero).

**M**ulanya, Purbaya mengaku merasa kesal akibat mandeknya investasi kilang baru PT Pertamina (Persero). Dia menyampaikan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR.

Purbaya membeberkan Pertamina belum membangun kilang baru sejak krisis 1998 yang berakibat pada ikut naiknya belanja impor bahan bakar minyak (BBM) setiap tahun. Konsekuensinya, Pertamina mesti membeli BBM dari Singapura untuk menambal kebutuhan domestik yang terus meningkat.

"Sejak krisis sampai sekarang tidak ada kilang baru, kalau bapak-ibu ketemu Danantara lagi, minta Pertamina bangun kilang baru," kata Purbaya awal pekan ini.

Tak berselang lama, Bahlil mengaku enggan berkomentar lebih jauh mengenai pernyataan Purbaya. Hal yang terang, Bahlil memastikan Kementerian ESDM terus mengawal proses pembangunan kilang yang sedang dijalankan Pertamina.

"Saya tidak mau mengomentari pernyataan orang lain. Silakan ditanyakan kepada orang yang mengomentari. Tugas saya adalah bagaimana memastikan agar mengawasi teman-teman, dengan Pertamina untuk yang kilang-kilang lagi berjalan," kata Bahlil dikutip Minggu (5/10/2025).

Asal tahu saja, Pertamina mengendalikan bisnis penyulingan minyak lewat anak usahanya, PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Saat ini, KPI mengoperasikan enam kilang dengan kapasitas pengolahan mencapai 1 juta barel per hari.

Sejumlah kilang itu termasuk refinery unit (RU) II Dumai dengan kapasitas 170 MBPOD, RU III Plaju berkapasitas 126 MBPOD, RU IV Cilacap berkapasitas 348 MBPOD, RU V Balikpapan berkapasitas 360 MBPOD, RU VI Balongan berkapasitas 150 MBPOD, dan RU VII Kasim berkapasitas 10 MBPOD.

Selanjutnya, mengenai data LPG. Dalam rapat kerja yang sama, Purbaya mengatakan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung beban subsidi sebesar 70% atau setara Rp30.000/tabung LPG 3 kg, sehingga harga jual eceran yang diterima masyarakat bisa ditekan ke level Rp12.750/liter.

Pada tahun lalu, serapan subsidi

untuk Gas Melon mencapai Rp80,2 triliun dengan jumlah penerima manfaat sekitar 41,5 juta pelanggan.

Di sisi lain, menurut Bahlil, Purbaya salah membaca data yang diberikan oleh bawahannya atau direktur jenderal di Kemenkeu. Bahkan, Bahlil menuding Purbaya masih butuh adaptasi menjadi Menteri Keuangan.

"Itu mungkin Menkeunya salah baca data itu, biasalah mungkin butuh penyesuaian," kata Bahlil kepada awak media di kantor BPH Migas, Kamis (2/10/2025).

"Mungkin Menkeunya belum dikasih masukan oleh Dirjennya dengan baik atau oleh timnya," lanjut Bahlil.

Pernyataan Bahlil kemudian kembali ditanggapi oleh Purbaya. Dia mengatakan saat ini tengah kembali mempelajari data subsidi LPG 3 Kg yang digelontor pemerintah senilai Rp30.000/tabung, sehingga harga keekonomian yang seharusnya Rp42.750/tabung dapat ditekan menjadi Rp12.750/tabung di tingkat pangkalan resmi Pertamina.

Purbaya menyebut perspektif Bahlil selaku Menteri ESDM dalam membaca data subsidi LPG 3 Kg mungkin berbeda dengan dirinya yang menggunakan sudut pandang akuntan. Untuk itu, dia tidak menyalahkan atau membenarkan pernyataan Bahlil bahwa dirinya "salah membaca data" subsidi

energi.

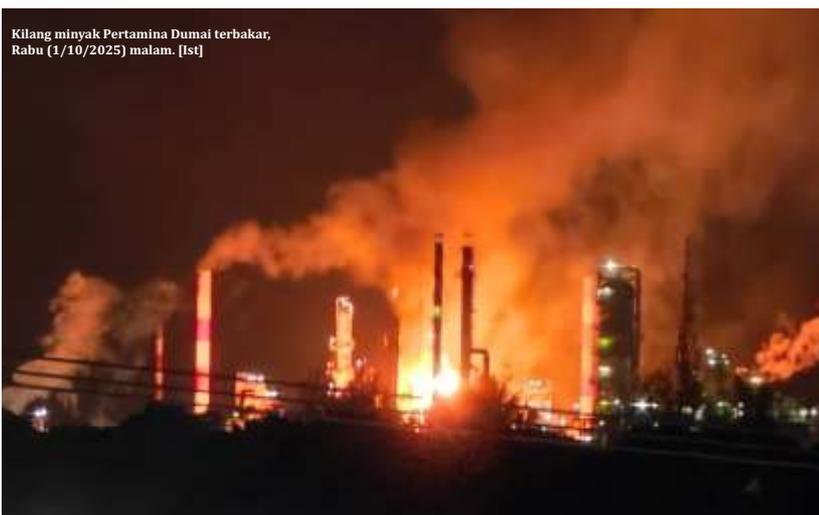
"Namun, saya yakin pada akhirnya besarannya sama juga. Kalau salah hitung bisa tambah duit, saya salah hitung terus biar uang tambah. Akan tetapi, seharusnya sama pada akhirnya."

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif IESR (Institute for Essential Service Reform), Fabby Tumiwa mengatakan pembangunan kilang bukan menjadi solusi tunggal untuk menekan impor BBM (Bahan Bakar Minyak). Justru menurutnya pembukaan kilang baru malah berpotensi meningkatkan impor minyak mentah, meski di satu sisi impor produk BBM bisa dikurangi.

Ia mengatakan, kapasitas produksi minyak di RI sendiri masih jauh lebih rendah dari kapasitas produksi kilang. Saat ini kapasitas produksi kilang di Indonesia tembus 1,1 juta barel per hari, sementara kapasitas produksi minyak mentahnya sendiri masih sekitar 578 ribu barel per hari.

"Harus diperhatikan juga, dengan bangun kilang, kita itu juga tetap akan impor bahkan bisa lebih banyak. Bangun kilang itu bukan mengurangi impor BBM, tapi karena produksi minyak mentah kita itu turun, maka nanti tetap saja harus impor minyak mentah," ujarnya.

Menurutnya pembangunan kilang bukan hanya perkara teknis, tetapi juga soal keekonomian jangka panjang. Kilang minyak memerlukan biaya investasi yang sangat besar dan usia pengoperasiannya bisa mencapai puluhan tahun. Karena itu, perlu perhitungan matang apakah proyek tersebut benar-benar akan menguntungkan di masa depan. (wid,rls,blo/dya)



Kilang minyak Pertamina Dumai terbakar, Rabu (1/10/2025) malam. [Ist]

## Kilang Dumai Terbakar, ESDM Klaim Pasokan Aman

**KILANG** minyak PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) Refinery Unit II Dumai meledak dan terbakar sekitar pukul 20.30 WIB, Rabu (1/10/2025) malam.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan operasional Kilang Dumai tetap berjalan normal meskipun sempat mengalami insiden kebakaran.

Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Laode menjelaskan bahwa sejak awal pihaknya menerima laporan dari manajemen kilang, kejadian tersebut tidak mengganggu operasional kilang itu.

"Secara globalnya pada saat malam terjadinya pun, tengah malam kami sudah dikasih info sama GM-nya bahwa (kebakaran itu) tidak mengganggu operasi yang ada, jadi yang penting itu," jelasnya dikutip dari Antara, Minggu (5/10/2025).

Laode menegaskan pasokan bahan bakar dari Kilang Pertamina Dumai masih berlangsung normal tanpa kendala berarti.

Semua sistem tetap terkendali sehingga kebutuhan energi masyarakat tidak terganggu dan tidak menimbulkan dampak luas.

"Operasional masih normal. Jadi pasokan dari Kilang Dumai juga masih tetap. Jadi semuanya masih

terkendali, nggak ada hal-hal yang spesifik banget," ujarnya.

Meski demikian, Laode menuturkan penyebab pasti kebakaran hingga kini belum dapat dipastikan. Proses investigasi masih berjalan dan hasilnya baru akan disampaikan setelah pemeriksaan teknis selesai dilakukan oleh pihak terkait.

Mengenai unit yang terdampak kebakaran, Laode belum memberikan penjelasan detail. Ia menekankan bahwa informasi teknis menunggu hasil penyelidikan resmi, agar publik menerima keterangan sesuai fakta di lapangan.

"Belum (diketahui penyebab kebakaran), masih dalam proses penyelidikan. Nanti kalau terkait spesifiknya saya belum bisa sampaikan," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengirim tim untuk mengecek Kilang Dumai, yang terbakar guna mencari tahu penyebab kebakaran tersebut. "Tim saya belum pulang dari lokasi (kebakaran)," ucap Bahlil, Kamis (2/10/2025). (wid,ant,ist/dya)

## Update Tragedi Ponpes Al Khoziny Sidoarjo

# 39 ORANG MENINGGAL, DITEMUKAN MOBIL MERCY

**SIDOARJO**-Korban yang bisa dievakuasi dari reruntuhan Ponpes Al Khoziny Sidoarjo terus bertambah. Sampai saat ini sudah ada 39 korban meninggal dunia yang ditemukan. Tak hanya itu, tim SAR gabungan mengevakuasi satu mobil Mercedes-Benz atau Mercy.

Mobil Mercy berwarna hitam itu terlihat ringsek saat ekskavator mengevakuasi. Belum diketahui siapa pemilik mobil tersebut.

Bangkai mobil itu telah dievakuasi dan diangkat menggunakan dump truk yang selanjutnya dibawa ke tempat pembuangan akhir.

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit saat ditanya terkait adanya mobil Mercy di lokasi kejadian, ia enggan berkomentar.

"Untuk evakuasi mobil kami tidak berkomentar di sana. Kami fokus di evakuasi dari korban-korban ataupun korban yang artinya manusianya," kata Nanang di posko asrama putri Al-Khoziny, Minggu (5/10/2025).

Di sisi lain, berdasarkan data Basarnas, temuan baru menambah jumlah korban meninggal dunia. Potongan tubuh kaki itu diekstriksi



Tim SAR gabungan saat mengevakuasi satu mobil Mercedes-Benz atau Mercy di reruntuhan bangunan ambruk Ponpes Al-Khoziny, Kecamatan Buduran, Sidoarjo. Foto: Dok. Istimewa

pukul 10.52 WIB dari sektor A1 atau dekat pintu masuk musala.

Sementara satu korban berikutnya dievakuasi pukul 11.45 WIB di sektor A2 atau area wudu. Dengan demikian, menurut Basarnas, hingga operasi hari ketujuh ini ada 104 orang selamat dan 39 meninggal dunia.

"Ditemukan dua korban ya. Memang kondisi satu body part, satu kami anggap jenazah. Tapi dari kemarin satu, jadi totalnya kan 143. Meninggal dunia 39, di antaranya dua dalam kondisi body part," ujar Nanang.

Satu jenazah dan satu potongan

tubuh itu telah dibawa ke RS Bhayangkara Polda Jatim untuk proses identifikasi. Sementara itu, hingga saat ini proses pembersihan bangunan juga terus dilakukan untuk memudahkan penemuan korban.

Progresnya telah mencapai 75%. Petugas hari ini membersihkan puing bangunan dengan bantuan ekskavator, kemudian jika ditemukan tanda-tanda adanya korban, akan dilakukan proses ekstriksi material.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan untuk dilakukan pendataan dan pengecekan

konstruksi bangunan setiap pondok pesantren (Ponpes) yang ada di Indonesia. Hal ini sebagai bentuk evaluasi usai kejadian robohnya bangunan Ponpes Al Khoziny yang menimbulkan puluhan korban jiwa di Sidoarjo, Jawa Timur.

"Evaluasi ke depan, ke semua pondok pesantren, kita harapkan segera didata dan dipastikan keamanan dari sisi bangunan bangunan, infrastruktur pondok masing masing," kata Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan pesan Presiden Prabowo di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10/2025).

Prasetyo menjelaskan Prabowo terus memonitor kabar penanganan terhadap insiden di Ponpes Al Khoziny. Dia mengatakan Prabowo juga telah memerintahkan menteri hingga gubernur untuk terus memberi perhatian.

"Sudah, sudah, beliau memonitor terus makanya beliau kemudian memerintahkan kepada para menteri terkait dan gubernur dan wakil gubernur untuk terus memberikan perhatian," ungkap Prasetyo. (wid,rls,ant/dya)

## PPN BERONDONG RAMPUNGKAN CEK FISIK KAPAL PERIKANAN UNTUK PENERBITAN SKKP

**TUBAN** -Dalam upaya memastikan keselamatan nelayan serta mendukung tata kelola perikanan yang berkelanjutan, petugas dari Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Berondong telah menyelesaikan kegiatan cek fisik kapal perikanan terkait permohonan Sertifikat Kelayakan Kapal Perikanan (SKKP).

Kegiatan inspeksi lapangan tersebut dilaksanakan selama dua hari, 22 hingga 23 September 2025, di fasilitas UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Bulu, Tuban. Pemeriksaan dilakukan sebagai syarat utama bagi pemilik kapal yang mengajukan permohonan SKKP, sekaligus untuk memastikan kapal benar-benar laik beroperasi di laut.

Cek fisik dilakukan oleh tim teknis PPN Berondong dengan fokus pada berbagai komponen penting kapal, antara lain alat keselamatan dan navigasi, alat tangkap ikan, mesin penggerak utama, serta struktur



kapal mulai dari anjungan hingga buritan. Pemeriksaan ini bertujuan memastikan kapal memenuhi standar keamanan pelayaran, efisiensi operasional, serta menjaga mutu hasil tangkapan.

SKKP yang diterbitkan menjadi

bukti resmi bahwa kapal telah memenuhi tiga standar utama kelayakan, yaitu laik laut (aman berlayar), laik tangkap (efektif menangkap ikan), dan laik simpan (mampu menjaga kualitas hasil tangkapan). Sertifikat tersebut

juga menjadi bentuk jaminan bahwa kapal tidak menimbulkan risiko kerusakan lingkungan laut akibat operasional yang tidak sesuai standar.

Sebelum memperoleh SKKP, pemilik kapal diwajibkan melalui tahapan administrasi dan teknis yang ketat. Mulai dari pengajuan permohonan hingga verifikasi dokumen seperti Buku Kapal Perikanan (BKP) dan dokumen kepemilikan. Hanya kapal yang dinyatakan lulus seluruh item pemeriksaan fisik yang dapat diterbitkan sertifikat kelayakannya.

Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat nelayan. Partisipasi aktif para pemilik kapal menunjukkan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kelengkapan administrasi dalam mendukung perikanan yang tertib dan berkelanjutan. (adv)

# Realisasi Pajak Kabupaten Malang Capai 76,91%, Jasa Parkir dan Listrik Masih Lesu

**MALANG** - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang, mencatat realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 76,91 persen per awal Oktober 2025. Namun, dari 12 jenis pajak yang dikelola, dua sektor masih menunjukkan kelesuan, yakni Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tenaga listrik dan PBJT jasa parkir.

Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara, menyampaikan capaian 76,91 persen tersebut bersumber dari data yang tercatat secara real time di laman sipanji.id.

"Hingga awal Oktober, realisasi pajak daerah Kabupaten Malang telah mencapai 76,91 persen dari total target tahun ini. Artinya, dari total target penerimaan pajak daerah sebesar Rp730,2 miliar, realisasi hingga awal Oktober ini sudah tercatat sebesar Rp561,6 miliar," ujar Made, dikutip pada Minggu (5/10/2025).

Made menyebut, realisasi dari dua sektor pajak yang masih lesu, yakni PBJT tenaga listrik dan PBJT jasa parkir, masih di bawah 70 persen. Untuk PBJT tenaga listrik, menurutnya, capaian baru mencapai 61,89 persen atau Rp94,91 miliar dari target Rp153,37 miliar.

Made menjelaskan, kondisi ini terjadi karena pengenaan pajak tenaga listrik telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang menetapkan tarif sebesar 10 persen.

"Itu kan pengenaannya sebesar 10 persen. Potensi pajak diketahui oleh pihak PLN, sementara pembayarannya di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)," terang Made.

Untuk PBJT jasa parkir, realisasi baru mencapai 65,34 persen atau Rp1,03 miliar dari target Rp1,58 miliar. Made menjelaskan, capaian pajak parkir sangat bergantung pada banyaknya kegiatan dan kunjungan wisata di Kabupaten Malang.

"Kami membina para pengelola agar rutin melaporkan pendapatan mereka sesuai kondisi di lapangan," jelasnya. Namun, Made juga menyampaikan, dari 12 sektor pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mencatatkan realisasi tertinggi, yakni 94 persen atau Rp107,75 miliar dari target Rp114,62 miliar.

Menurutnya, capaian tersebut meningkat signifikan dibanding awal September 2025 yang masih berada di angka 87,34 persen.

Selain PBB, PBJT makanan dan minuman (mamin) juga mencatat capaian tinggi, yakni 89,16 persen atau Rp16,74 miliar dari target Rp18,78 miliar. Sementara PBJT jasa kesenian dan hiburan mencapai 84,81 persen atau Rp6,80 miliar dari target Rp8,02 miliar.

Untuk jenis pajak lainnya, yaitu pajak reklame mencapai 87,82 persen atau Rp4,33 miliar dari target Rp4,93 miliar. Kemudian pajak air tanah mencapai 86,27 persen atau Rp6,03 miliar dari target Rp6,99 miliar.

Sementara itu, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terealisasi 75,19 persen atau Rp145,59 miliar dari target Rp193,63 miliar. Di sisi lain, opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) mencapai 77,22 persen atau Rp121,49 miliar dari target Rp157,33 miliar.

Serta opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tercatat 80,59 persen atau Rp49,79

miliar dari target Rp61,79 miliar.

Lebih lanjut, Made menegaskan, Bapenda terus melakukan berbagai langkah untuk mendorong peningkatan realisasi pajak daerah menjelang akhir tahun. Salah satu program yang dijalankan adalah Bapenda Menyapa Warga (BMW), yang digelar setiap bulan di berbagai desa, kelurahan, dan pusat keramaian di Kabupaten Malang. (Santi/Dya)



## DPRD Kota Malang Soroti MBG: Baru 10 Dapur Beroperasi Layani 29 Ribu Siswa

Ilustrasi: Salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang beroperasi di Kecamatan Klojen, Kota Malang. (Santi/Lentera)



(BGN) yang dimuat pada laman bgn.go.id, baru 10 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi di Kota Malang, sehingga belum mampu memenuhi kebutuhan ribuan siswa penerima manfaat.

"Tenaga masak itu kan nggak mudah. Masak jumlah besar, kemudian sudah dimulai jam 2 pagi. Kalau baru ada beberapa dapur, ya repot," ujar anggota DPRD Kota Malang, Suyadi, Minggu (5/10/2025).

Suyadi menilai, sejatinya MBG merupakan langkah positif pemerintah untuk mendukung pemenuhan gizi anak sekolah. Namun, ia mengingatkan program ini belum sepenuhnya siap secara teknis di daerah, khususnya dalam hal operasional dapur SPPG.

Disebutkannya, jumlah dapur yang beroperasi di Kota Malang masih sangat terbatas. Padahal, setiap dapur harus mampu memasak dan mendistribusikan ribuan porsi makanan ke berbagai sekolah setiap hari.

Kondisi tersebut, menurutnya, berpotensi menurunkan efektivitas program jika tidak segera diatasi. Berdasarkan catatan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) wilayah Kota Malang, hingga saat ini terdapat 13 dapur SPPG yang sudah terbentuk, dengan 10 di antaranya telah resmi beroperasi.

Dari jumlah tersebut, program MBG baru menjangkau sekitar 29 ribu siswa penerima manfaat. Koordinator Wilayah SPPI Kota Malang, Muhammad Athoillah, menjelaskan, idealnya Kota Malang membutuhkan 85 dapur SPPG agar seluruh peserta didik dapat terlayani.

Hal itu merujuk pada proyeksi kapasitas setiap dapur yang mampu melayani sekitar 3.000 porsi makanan per hari.

Sementara itu, data dari Portal

Data Pendidikan Kemendikdasmen per 29 September 2025, tercatat jumlah peserta didik aktif di Kota Malang mencapai 224.063 orang. Artinya, dengan jumlah dapur yang masih terbatas, program MBG di Kota Malang baru mampu menjangkau sebagian kecil dari total siswa yang menjadi sasaran program.

Lebih lanjut, selain menyoroti persoalan dapur dan tenaga masak, Suyadi juga menaruh perhatian pada pengelolaan makan di sekolah. Ia menilai guru perlu dilibatkan lebih jauh dalam pengaturan kegiatan makan bersama siswa. Untuk memastikan pelaksanaan berjalan tertib dan higienis.

"Kalau makan di ruang kelas, siapa yang ngelola? Sementara gurunya tidak dapat makan," paparnya.

Menurut Suyadi, seluruh kendala teknis yang muncul perlu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah. Agar pelaksanaan program MBG ke depan dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran. (Santi/Dya)

# POLANDIA SIAGAKAN JET TEMPUR USAI RUSIA BOMBARDIR UKRAINA

Rusia kembali melancarkan serangan besar-besaran terhadap Ukraina, khususnya di wilayah Zaporizhzhia, pada Minggu (5/10/2025). Serangan tersebut menewaskan seorang perempuan dan melukai sembilan orang lainnya.

**A**kibat gempuran itu, Polandia yang berbatasan langsung dengan Ukraina dan merupakan anggota NATO mengerahkan jet tempur untuk memantau secara langsung situasi di wilayah udaranya akibat serangan Rusia.

Kepala wilayah Ukraina tenggara, Ivan Fedorov, mengungkapkan bahwa korban tewas adalah seorang gadis berusia 16 tahun. Meski sempat mendapat perawatan di rumah sakit, nyawanya tidak berhasil diselamatkan.

Fedorov juga membagikan sejumlah foto dari lokasi serangan yang memperlihatkan bangunan bertingkat yang rusak parah serta sebuah mobil yang terbakar habis.

Akibat serangan terbaru Rusia tersebut, Ukraina memberlakukan peringatan udara nasional sejak pukul 04.09 waktu setempat (01.09 GMT).

Di sisi lain, militer Polandia melalui platform X mengumumkan bahwa mereka telah mengerahkan jet tempur dan menempatkan sistem pertahanan darat dalam kondisi siaga tinggi untuk melindungi wilayah udara, terutama di kawasan yang berbatasan langsung dengan Ukraina.

Ini dilakukan kala Polandia mengalami "intrusi" dari drone dan jet tempur Rusia yang beberapa kali menerobos masuk wilayahnya dalam beberapa pekan terakhir kala Moskow melancarkan serangan ke Ukraina.

Wali Kota Lviv, kota di Ukraina yang berbatasan dengan Polandia, mengatakan jalur transportasi umum tidak beroperasi akibat "serangan besar-besaran musuh".

Dikutip AFP, Wali Kota Ivano-Frankivsk, kota lain di Ukraina barat, transportasi umum juga ikut terdampak imbas serangan Rusia ini.

Rusia juga meningkatkan serangan terhadap infrastruktur energi Ukraina seiring turunnya suhu udara.

Fedorov mengatakan serangan semalam di Zaporizhzhia menyebabkan lebih dari 73.000 pelanggan kehilangan pasokan listrik.

Wali Kota Lviv menyebut sebagian kota juga mengalami pemadaman listrik imbas gempuran.

Pekan ini, Moskow juga melancarkan serangan terbesar yang pernah terjadi terhadap infrastruktur gas Ukraina. Serangan Moskow ikut memutus aliran listrik ke sekitar 50.000 rumah tangga di wilayah Chernigiv bagian utara.

Sementara itu, kepala pengawas nuklir PBB mendesak Ukraina dan Rusia pada hari Jumat untuk



Serangan udara Rusia di Zaporizhzhia, Ukraina. (Foto: Layanan Darurat Ukraina via AP)

menunjukkan "kemauan politik" yang diperlukan untuk menjaga keamanan area di sekitar pabrik, yang terbesar di Eropa, yang direbut oleh pasukan Rusia pada minggu-minggu awal invasi Moskow ke Ukraina. Belum ada komentar langsung dari Rusia tentang serangan Sabtu malam itu.

Kedua belah pihak telah melancarkan serangan udara sepanjang perang yang bertujuan menghancurkan infrastruktur yang dianggap penting bagi upaya perang secara keseluruhan, termasuk fasilitas energi dan transportasi. (AFP, France24, Reuters, CNN, ist/nei)

## Putin Peringatkan AS soal Tomahawk: Hubungan akan Runtuh

**PRESIDEN** Rusia Vladimir Putin memperingatkan bahwa pengiriman rudal Tomahawk oleh Amerika Serikat ke Ukraina akan menghancurkan hubungan Moskow-Washington.

Pernyataan itu muncul tak lama setelah pertemuan Putin dan Presiden AS Donald Trump di Alaska, di tengah meningkatnya ketegangan akibat kemajuan pasukan Rusia dan dugaan pelanggaran udara NATO.

Trump sempat menyebut Rusia sebagai "macan kertas", sementara Putin menantang balik dengan menyebut NATO mungkin "macan kertas" yang gagal menahan laju Rusia.

Wakil Presiden AS JD Vance sebelumnya mengatakan Washington masih mempertimbangkan permintaan Ukraina untuk memperoleh rudal Tomahawk jarak jauh.

"Ini akan menyebabkan hancurnya hubungan kita, atau setidaknya tren positif yang telah muncul dalam hubungan ini," kata Putin dalam klip video yang dirilis pada hari Minggu (5/10/2025) oleh

reporter televisi pemerintah Rusia Pavel Zarubin.

The Wall Street Journal melaporkan pekan lalu bahwa Amerika Serikat berencana memberikan data intelijen kepada Ukraina terkait target infrastruktur energi jarak jauh di wilayah Rusia. Sementara itu, Ukraina disebut tengah mempertimbangkan pengiriman rudal Kyiv untuk mendukung serangan tersebut. Dua pejabat membenarkan laporan itu kepada Reuters.

Namun, menurut seorang pejabat AS dan tiga sumber lainnya, rencana pemerintahan Trump untuk memasok rudal jelajah Tomahawk jarak jauh ke Ukraina kemungkinan sulit diwujudkan karena stok yang ada saat ini diprioritaskan untuk kebutuhan Angkatan Laut AS dan keperluan militer lainnya.

Rudal Tomahawk memiliki jangkauan hingga 2.500 kilometer (sekitar 1.550 mil), yang berarti jika Ukraina memilikinya, maka Kremlin dan seluruh wilayah Rusia bagian Eropa bisa berada dalam jangkauan serangan.

Pada hari Kamis, Putin mengatakan bahwa mustahil menggunakan Tomahawk tanpa partisipasi langsung personel militer AS. Oleh karena itu, pasokan rudal semacam itu ke Ukraina akan memicu "tahap eskalasi baru yang kualitatif".

"Ini akan menandai dimulainya tahap eskalasi yang benar-benar baru dan kualitatif, termasuk dalam hubungan antara Rusia dan Amerika Serikat," ujar Putin.

Ia menambahkan bahwa Tomahawk dapat membahayakan Rusia, tetapi Rusia hanya akan menembak jatuh rudal tersebut dan meningkatkan pertahanan udaranya sendiri.

Putin menggambarkan perang Ukraina sebagai momen penting dalam hubungan Moskow dengan Barat, yang menurutnya memperlakukan Rusia setelah runtuhnya Uni Soviet tahun 1991 dengan memperluas NATO dan melanggar apa yang dianggapnya sebagai lingkup pengaruh Moskow. (Reuters, The Wall Street Journal, ist/nei)

# Jangan Panik, Ini Bahan Alami Pereda Keracunan

**K**eracunan makanan dapat menimpa siapa saja dengan gejala awal berupa mual, muntah, hingga diare yang membuat tubuh menjadi lemah. Pada kasus yang lebih parah, kondisi ini bisa memicu gangguan serius seperti kejang, bibir tampak kebiruan, bahkan kehilangan kesadaran.

Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia (PDPOTJI), Ingrid Tania, menjelaskan bahwa keracunan umumnya disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi virus, bakteri, parasit, atau zat kimia. Kontaminasi tersebut biasanya terjadi akibat proses memasak yang tidak sempurna atau penyimpanan makanan yang tidak higienis.

Saat mengalami keracunan, wajar jika merasa khawatir. Tapi, jangan buru-buru panik, karena ada beberapa bahan alami yang bisa membantu meredakan gejalanya. "Penggunaan herbal atau jamu itu tergantung dari penyebab keracunan makanannya ya," kata Ingrid dikutip dari Antara, Jumat (3/10/2025).

## Air Kelapa

Menurut Ingrid, air kelapa hijau atau kelapa muda mengandung garam alami serta mineral penting seperti kalium dan potasium yang dibutuhkan tubuh ketika mengalami dehidrasi. Kandungan tersebut membuat air kelapa berfungsi sebagai elektrolit alami yang dapat membantu menyeimbangkan cairan tubuh. Karena itu, bagi orang yang mengalami keracunan makanan, disarankan untuk mengonsumsi segelas air kelapa setiap kali muntah atau buang air besar. Langkah ini bertujuan untuk menggantikan cairan yang hilang sekaligus membantu menjaga kondisi tubuh agar tidak semakin lemah akibat kekurangan cairan.

## Air Rebusan Jahe

Bahan alami lain yang dapat dimanfaatkan adalah jahe. Menurut Ingrid, air rebusan jahe mampu membantu meredakan rasa mual maupun muntah yang sering muncul pada kondisi

tertentu, termasuk saat tubuh tidak dalam keadaan fit. Jahe juga dikenal memiliki sifat hangat yang baik untuk pencernaan serta membantu menenangkan perut.

Proses pembuatannya pun terbilang sederhana. Cukup siapkan sekitar 10 gram jahe segar yang telah diiris, lalu rebus bersama 250–300 ml air hingga mendidih. Air rebusan jahe ini bisa diminum dalam keadaan hangat untuk mendapatkan manfaat yang optimal.

## Teh Bunga Chamomile dan Daun Pepermin

Selain air rebusan jahe, teh bunga chamomile maupun daun pepermin juga bisa menjadi pilihan alami untuk meredakan gejala keracunan makanan. Kedua jenis herbal ini sudah lama dikenal memiliki sifat menenangkan pada sistem pencernaan, sehingga dapat membantu mengurangi rasa mual, muntah, maupun ketidaknyamanan pada perut. Minuman hangat dari chamomile atau pepermin bisa memberikan efek relaksasi sekaligus menenangkan perut yang terganggu.

Menurut Ingrid, daun mint yang telah dibersihkan juga bisa dikonsumsi secara langsung sebagai alternatif. Daun mint segar memiliki kandungan minyak esensial yang mampu memberi sensasi segar dan membantu meredakan rasa mual. Konsumsi mint secara langsung dapat menjadi solusi praktis, terutama bagi orang yang tidak sempat menyiapkan the herbal. Penggunaan bahan-bahan alami ini bisa menjadi langkah awal yang sederhana dalam meredakan gejala sebelum mendapatkan

penanganan medis. Namun, meski bermanfaat, tetap penting untuk memperhatikan kondisi tubuh. Jika gejala keracunan tidak juga membaik, sebaiknya segera mencari pertolongan tenaga medis agar tidak menimbulkan masalah kesehatan yang lebih serius.

## Air Rebusan Adas

Bahan alami lainnya yang dapat dimanfaatkan adalah air rebusan adas. Minuman ini dipercaya membantu meredakan sakit perut maupun kram perut yang sering muncul sebagai gejala keracunan makanan. Kandungan alami dalam biji adas dapat memberikan efek menenangkan pada sistem pencernaan sehingga rasa tidak nyaman di perut berangsur berkurang.

Selain adas, air rebusan jintan putih atau ketumbar juga bisa menjadi alternatif. Kedua bahan ini memiliki sifat yang baik untuk kesehatan pencernaan dan dapat membantu mengurangi rasa sakit pada perut.

## Yoghurt dan Pisang

Selain itu, yoghurt bisa membantu menambah jumlah bakteri baik di saluran pencernaan, sehingga dapat melawan bakteri jahat penyebab keracunan. Namun, Ingrid menekankan agar pemberian yoghurt tetap memperhatikan riwayat alergi penderita. Pisang yang kaya mineral juga dianggap bermanfaat bagi mereka yang memiliki pencernaan sensitif. Ingrid menekankan penanganan keracunan makanan harus dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya mengandalkan satu jenis bahan saja. (nei,ist/dya)



Rebusan Adas



Air Kelapa



Rebusan Jahe



Yoghurt dan Pisang

# Proof of Human, Teknologi Baru Penangkal Penipuan Online

**D**itengah meningkatnya penyalahgunaan kecerdasan buatan (AI) untuk menyebarkan konten palsu dan melakukan penipuan digital, World menghadirkan teknologi proof of human sebagai upaya memastikan bahwa pengguna internet benar-benar manusia, bukan sekadar bot.

Teknologi ini dibangun oleh World melalui sebuah protokol open-source yang dirancang untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman, transparan, serta dapat dipercaya oleh semua penggunanya.

Hingga kini World App berada di 160 negara. Verifikasi World ID telah menjangkau ke Amerika Serikat serta beberapa negara di benua Eropa, Amerika Latin, dan Asia. Termasuk Indonesia, Jepang, Korea Selatan, dan negara Asia Tenggara lainnya.

Proof of human semakin penting di era digital saat ini, terutama dengan maraknya kejahatan siber yang memanfaatkan teknologi deepfake. Deepfake merupakan hasil manipulasi video atau suara menggunakan kecerdasan buatan (AI) sehingga terlihat atau terdengar sangat mirip dengan tokoh asli. Penyalahgunaan teknologi ini berpotensi menimbulkan kerugian besar, mulai dari penyebaran informasi palsu hingga merusak reputasi seseorang.

Urgensi ini semakin diperkuat oleh Laporan Pertumbuhan Deepfake yang dirilis Sumsud, yang mencatat lonjakan hingga 1.550 persen kasus deepfake sepanjang tahun 2024.



Peningkatan signifikan tersebut terutama terjadi pada masa pemilu, di mana konten manipulatif digunakan untuk memengaruhi opini publik. Data ini menegaskan perlunya sistem verifikasi identitas digital yang dapat memastikan keaslian pengguna, salah satunya melalui penerapan proof of human.

Untuk menjawab tantangan meningkatnya kejahatan digital, World App menghadirkan teknologi World ID, yakni identitas digital yang berfungsi membuktikan bahwa seseorang benar-benar manusia, sehingga dapat membantu menciptakan ruang digital yang lebih aman dan terpercaya.

Verifikasi keaslian manusia (Humanness verification) dilakukan

menggunakan Orb yang mengambil foto mata dan wajah pengguna untuk membuktikan bahwa mereka adalah manusia yang unik. Foto-foto tersebut diubah menjadi kode numerik yang disebut kode iris.

Kode iris dienkripsi, segera ditransfer ke ponsel pengguna dan dihapus secara permanen dari Orb. Konsep ini dikenal sebagai Personal Custody, yaitu sistem yang memastikan setiap individu tetap memegang kendali penuh atas data pribadinya.

Perangkat Anda kemudian mengirimkan kode iris yang dibagikan ke layanan Anonymised MultiParty Computing service, yang kemudian dipecah menjadi beberapa bagian yang

dianonimkan, dienkripsi, dan didistribusikan serta disimpan dengan aman di beberapa pihak independen.

Teknologi yang menjaga privasi seperti Anonymised MultiParty Computing memungkinkan komputasi bersama (joint computation) sekaligus menganonimkan data dan Zero-Knowledge Proof, yang memungkinkan verifikasi tanpa mengungkapkan informasi tersembunyi apa pun.

Teknologi ini dikembangkan dengan tujuan utama untuk memberikan perlindungan maksimal, sehingga mampu menjamin tingkat keamanan data serta menjaga privasi pengguna pada level tertinggi.

Selain itu, pengguna dapat mengakses World App, yakni sebuah aplikasi inovatif yang menawarkan beragam layanan digital modern yang terintegrasi dalam satu ekosistem. Melalui aplikasi ini, pengguna tidak hanya dapat menikmati berbagai konten edukasi interaktif yang dirancang untuk meningkatkan literasi digital dan pengetahuan teknologi terkini, tetapi juga dapat berpartisipasi dalam permainan daring yang menggabungkan unsur hiburan dan sistem reward berbasis blockchain. Tak hanya itu, World App juga menyediakan layanan komunitas berbasis Web3, yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berdiskusi, serta membangun jaringan sosial dan profesional di dalam lingkungan digital yang aman dan terdesentralisasi. (nei,ist/dya)



HARIAN  
**LENTERA**  
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"  
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI  
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)  
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)  
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)  
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, NEISKA OLIVIANA (CO)

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY  
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)  
download edisi digital pada web  
www.lenteratoday.com  
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS  
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



**MEDIA TERVERIFIKASI**

**BIRO: SURABAYA:** YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO | **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) | **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH | **LAMONGAN:** L HANDI | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **KEDIRI:** GATOT SUNARKO | **JOMBANG :** SUTONO | **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO :** IMAN SANTOSO | **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO | **MADIUN: WIWIET EKO PRASETYO ( SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA)** | **MALANG RAYA: SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I MADURA RAYA: SAHLAN KURNIAWAN I TRENGGALEK: TINA W I NGAWI: DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I DKI JAKARTA: FUAD HASSAN I LOMBOK BARAT: MUHAYYAN I PALANGKA RAYA: NOVITA MASNIARI**

**PENASEHAT HUKUM** DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN | **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILAH | **DESAIN GRAFIS** PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

## Bleph Bun, Alternatif Eyelift Instan Namun Berisiko

**B**anyak orang menginginkan wajah yang selalu tampak segar, bercahaya, dan kencang. Tampilan seperti ini kerap dikaitkan dengan kesan muda dan sehat, sehingga tidak mengherankan jika banyak orang berusaha mencapainya melalui berbagai perawatan kecantikan. Namun, kenyataannya, untuk mendapatkan efek tersebut, tidak selalu diperlukan prosedur atau perawatan yang mahal.

Saat ini, ada trik sederhana yang tengah menjadi perbincangan dan viral di kalangan selebritas Hollywood, yakni metode yang dikenal dengan sebutan bleph bun. Trik ini diklaim mampu memberikan kesan mata yang lebih segar dan area wajah yang tampak lebih kencang tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk perawatan klinis.

### Apa Itu Bleph Bun?

Dikutip dari New York Times, bleph bun adalah gaya rambut sanggul atau ponytail yang diikat sangat kencang, yang disebut-sebut dapat memberikan efek mirip eyelift. Ikatan rambut yang rapat membuat sudut mata terlihat lebih terangkat, alis tampak naik, dan garis halus di sekitar mata menjadi tersamarkan. Akibatnya, wajah terlihat lebih muda, segar, dan bercahaya.

Tren ini menjadi ramai diperbincangkan setelah banyak selebritas papan atas terlihat menggunakannya. Ariana Grande, yang terkenal dengan ponytail ikoniknya, Anne Hathaway saat menghadiri New York Fashion Week, hingga Lindsay Lohan, semuanya pernah tampil dengan gaya ini. Bahkan, Selena Gomez dan Hailey Bieber juga tertangkap kamera mengenakan bleph bun. Gaya rambut ini mendapatkan julukan sebagai

'facelift gratis' karena efek instan yang ditimbulkannya. Tanpa prosedur kecantikan mahal, hanya dengan karet rambut, siapa saja dapat memperoleh tampilan wajah yang lebih kencang dan segar.

Selain praktis, tren ini menunjukkan bagaimana teknik sederhana dalam menata rambut dapat memengaruhi penampilan wajah secara signifikan. Tak heran jika bleph bun semakin populer di kalangan penggemar kecantikan yang ingin tampil muda dan menawan tanpa harus mengeluarkan biaya besar.

### Bahaya di Balik Tren Rambut Bleph Bun

Meskipun tren rambut bleph bun tengah populer karena mampu memberikan efek instan pada penampilan wajah, gaya ini sebenarnya memiliki potensi risiko jika dilakukan terlalu sering. Ikatan rambut yang terlalu kencang dapat memberikan tekanan berlebih pada kulit kepala dan akar rambut. Kondisi ini bisa memicu kerontokan, bahkan dalam jangka panjang berisiko menyebabkan traction alopecia atau kebotakan akibat tarikan berulang.

Selain itu, bleph bun juga dapat menimbulkan ketegangan pada otot wajah dan leher. Jika dilakukan terus-menerus, hal ini dapat memicu rasa tidak nyaman, sakit kepala, hingga ketegangan pada rahang. Bagi sebagian orang dengan kulit sensitif, ikatan kencang juga dapat menyebabkan iritasi pada kulit kepala.

Efek sementara seperti tampilan wajah yang lebih kencang memang menarik, tetapi perlu diingat bahwa gaya rambut ini tidak memberikan hasil permanen. Justru jika dipaksakan, dampak negatifnya bisa lebih besar daripada manfaat estetik yang diperoleh.

Oleh karena itu, para ahli kecantikan menyarankan untuk tidak terlalu sering menggunakan gaya bleph bun. Mengikat rambut dengan longgar, memberikan waktu istirahat bagi kulit kepala, serta merawat rambut dengan baik dapat membantu mengurangi risiko kerusakan akibat tren ini. Berikut adalah tips aman jika ingin mencoba:

### Tidak Dipakai Setiap Hari

Memberi jeda penggunaan gaya bleph bun sangat penting agar kulit kepala dan akar rambut dapat "bernafas." Jika rambut terus-menerus diikat kencang tanpa istirahat, folikel rambut bisa mengalami tekanan berlebihan yang memicu kerontokan. Dengan memberikan waktu longgar, kesehatan kulit kepala tetap terjaga dan rambut dapat tumbuh lebih kuat.

Selain itu, jeda pemakaian juga membantu mengurangi risiko gangguan lain seperti sakit kepala atau rasa tegang di area kulit kepala akibat ikatan yang terlalu sering. Dengan pola penggunaan yang seimbang, efek estetika dari bleph bun tetap bisa dinikmati tanpa mengorbankan kesehatan rambut dalam jangka panjang.

### Ikatan Tidak Terlalu Ekstrem

Jangan selalu menarik rambut terlalu keras saat membuat gaya bleph bun. Ikatan yang terlalu kencang dapat menimbulkan tekanan berlebih pada kulit kepala dan folikel rambut, sehingga berisiko menyebabkan kerontokan atau bahkan kebotakan akibat tarikan berulang. Selain itu, tarikan kuat

juga bisa menimbulkan rasa tidak nyaman, seperti sakit kepala atau pegal di area leher.

Dengan mengikat rambut secukupnya, tampilan tetap rapi tanpa harus memberi beban berlebih pada rambut.

Cara ini tidak hanya menjaga kesehatan kulit kepala, tetapi juga membantu rambut tetap kuat dan terhindar dari kerusakan jangka panjang, sehingga manfaat estetika bleph bun bisa diperoleh tanpa efek samping yang merugikan.

### Variasikan Gaya Rambut

Disarankan untuk berganti antara gaya rambut yang longgar dan kencang agar tekanan pada rambut tidak terjadi secara terus-menerus. Dengan begitu, folikel rambut memiliki kesempatan untuk beristirahat dan tidak mengalami tarikan berulang yang dapat memicu kerontokan maupun kerusakan. Pergantian gaya ini juga membantu menjaga sirkulasi di kulit kepala tetap lancar. (nei,ist/dya)

**Pembekuan Singkat ...dari hal 1**

**K**ementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Republik Indonesia (RI) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital membekukan sementara (suspend) tanda daftar penyelenggara sistem elektronik (TDPSE) terhadap TikTok Pte. Ltd. Pada Jumat (3/10/2025). Pembekuan tersebut karena ketidakpatuhan platform media sosial (medsos) tersebut dalam memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Pembekuan ini berkaitan dengan demo pada Agustus 2025 lalu dan terkait adanya dugaan monetisasi live dari akun yang terindikasi judi online (judol) saat aksi unjuk rasa tersebut.

"Langkah ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah setelah TikTok hanya memberikan data secara parsial atas aktivitas TikTok Live selama periode unjuk rasa 25-30 Agustus 2025," kata Direktur Jenderal (Dirjen) Pengawasan Ruang Digital Komdigi RI, Alexander Sabar lewat keterangan tertulis, Jumat (3/10/2025).

Namun, pembekuan itu hanya berjalan sesaat, Sabtu (4/10/2025), Alexander mengumumkan pencabutan pembekuan sementara TikTok karena setelah platform tersebut dinilai memenuhi kewajiban untuk menyampaikan data yang diminta oleh pemerintah.

"TikTok telah mengirimkan data yang diminta berkaitan dengan eskalasi traffic dan aktivitas monetisasi TikTok Live pada periode 25-30 Agustus 2025 melalui surat resmi tertanggal 3 Oktober 2025," kata Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar pada Sabtu (4/10/2025).

Sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian yang dikonfirmasi pada Minggu (5/10/2025), Alexander mengatakan bahwa data yang disampaikan oleh TikTok mencakup rekapitulasi harian eskalasi traffic, besaran monetisasi, serta indikasi monetisasi yang melanggar secara agregat.

Setelah melakukan analisis menyeluruh, Komdigi menilai kewajiban untuk menyediakan data telah dipenuhi oleh penyedia platform TikTok.

Dengan dasar pemenuhan kewajiban tersebut, Alexander mengatakan, Komdigi mengakhiri pembekuan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) dan mengaktifkan kembali status TikTok sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik yang terdaftar.

Komdigi mengawasi seluruh Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat atau PSE Privat untuk memastikan mereka mematuhi ketentuan hukum nasional.

"Kami akan terus melakukan pengawasan dan komunikasi berkelanjutan dengan seluruh PSE Privat guna memastikan efektivitas pelaksanaan regulasi serta keberlanjutan ekosistem digital yang aman, terpercaya, dan kondusif bagi seluruh pengguna," kata Alexander.

Atas pembekuan sejenis ini, berbagai komentar pun terlontar dari netizen. "Aaah kurang seru dramanya," tulis akun Rony Setiawan.

"Ecek-ecek..Yang lebih berbobot gak berani sentuh, menu sesuai selera government, ..gak berkualitas blass..," kata akun Gala Tama.

"Ngapain dibekuin, tinggal lu patroli aja ditiktok akun<sup>2</sup> yg provokator lu banned," tulis akun Udin Cilok.

"tutup aja tuh Tiktok...gak guna dan gak berpengaruh pada kehidupan sebagian orang," kata akun Kanjeng Dimas.

Sebelumnya, terkait dengan pembekuan tersebut, Komdigi menyebut terdapat dugaan monetisasi live dari akun yang terindikasi aktivitas judol ketika demo pada Agustus tahun ini. Pihaknya meminta data yang mencakup informasi jumlah pengunjung (traffic), aktivitas siaran langsung (live streaming), serta data monetisasi, termasuk jumlah dan nilai pemberian hadiah (gift) ketika melakukan live atau siaran langsung.

"Kami telah memanggil TikTok untuk memberikan klarifikasi secara langsung pada tanggal 16 September 2025, dan TikTok diberikan waktu hingga 23 September 2025 untuk menyampaikan data yang diminta secara lengkap," jelas Alexander, Jumat (3/10/2025) dilansir Bloomberg Technoz.

Namun, melalui surat resmi dari TikTok bernomor ID/PP/04/IX/2025 tertanggal 23 September 2025, disampaikan bahwa platform tersebut mempunyai kebijakan dan prosedur internal yang mengatur cara menangani dan menanggapi permintaan data. Sehingga, TikTok menyatakan tak bisa memberikan data yang diminta.

Permintaan data tersebut merujuk pada Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) Lingkup Privat. Beleid tersebut menyatakan PSE Lingkup Privat wajib memberikan akses terhadap sistem elektronik dan/atau data elektronik kepada kementerian atau lembaga dalam rangka pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Sehingga, Komdigi menilai TikTok telah melanggar kewajiban sebagai PSE Privat, dan kami mengambil langkah pembekuan sementara TDPSE sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan," tegas Alexander.

Dia menyatakan langkah tegas ini

bukan semata tindakan administratif, melainkan bentuk perlindungan negara untuk menjamin keamanan masyarakat Indonesia dari risiko penyalahgunaan teknologi digital, serta memastikan bahwa transformasi digital berjalan secara sehat, adil, dan aman bagi seluruh warga.

"Komdigi berkomitmen untuk menjaga kedaulatan hukum nasional dalam tata kelola ruang digital, termasuk memberikan perlindungan bagi pengguna, khususnya kelompok rentan anak dan remaja, dari potensi penyalahgunaan fitur digital untuk aktivitas ilegal," kata Alexander.

Untuk itu, lanjut dia, seluruh PSE Privat harus mematuhi hukum nasional yang berlaku. Komdigi RI juga menyebut bakal terus memperkuat pengawasan terhadap seluruh PSE terdaftar, mendorong kerja sama aktif yang konstruktif dengan seluruh pemangku kepentingan (stakeholder), dan memastikan bahwa setiap platform digital menjalankan operasionalnya dengan penuh tanggungjawab.

Kalau itu, Komdigi juga menjelaskan layanan platform berbagi video masih bisa digunakan, namun secara hukum TikTok dinyatakan non-aktif sebagai PSE terdaftar di Indonesia ingin pembekuan dicabut.

"Pembekuan TDPSE merupakan langkah administratif dalam pengawasan, dan berbeda dengan keputusan akses aplikasi. Selama pembekuan, layanan TikTok masih dapat digunakan masyarakat, meski secara hukum statusnya non-aktif sebagai PSE terdaftar," kata Alexander.

Dia juga menyatakan TikTok telah berkomunikasi dan koordinasi dengan pihaknya dalam rangka memberikan solusi konstruktif untuk pemenuhan kewajiban. Jika dipenuhi, status pembekuan tanda daftar akan langsung dipulihkan.

"TikTok telah melakukan komunikasi dan koordinasi untuk memberikan solusi konstruktif atas pemenuhan kewajiban. Jika kewajiban ini dipenuhi, status pembekuan dapat segera dipulihkan," jelasnya.

Terkait pembekuan itu, Alexander menjelaskan perhatian utama adalah adanya indikasi penyalahgunaan fitur Live Streaming. Dalam hal ini untuk monetisasi ilegal, termasuk dugaan praktik perjudian online yang berpotensi membahayakan anak dan remaja.

Manajemen TikTok Indonesia menanggapi langkah Komdigi. Juru Bicara TikTok mengatakan pihaknya menghormati bakal menghormati hukum dan regulasi tempatnya beroperasi termasuk Indonesia. Selain itu, mereka juga akan bekerja sama dengan Komdigi RI untuk membereskan isu ini.

"TikTok menghormati hukum dan regulasi di negara di mana kami beroperasi. Kami bekerja sama dengan Komdigi untuk menyelesaikan isu ini secara konstruktif," katanya lewat keterangan tertulis, dikutip Sabtu (4/10/2025).

Adapun, pembekuan tersebut sebelumnya dilakukan Komdigi melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital. Mereka menilai TikTok 'tidak patuh dalam memenuhi kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SAFENet Nenden Sekar Arum mengatakan pemerintah memang berwenang meminta akses data ke platform digital. Namun, pengaturan permintaan data yang termuat dalam Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 itu tidak jelas batasannya. "Masalahnya dari awal munculnya regulasi itu, substansinya sangat bersifat karet," ujar Nenden dilansir tempo Sabtu (4/10/2025).

Dia menilai ada potensi penyalahgunaan wewenang oleh Kemenkomdigi dengan meminta data elektronik kepada TikTok. Nenden mengatakan penyalahgunaan wewenang itu berbahaya lantaran bisa mengarah kepada pembatasan kebebasan berekspresi.

"Kami perlu mendorong agar mekanisme permintaan data oleh pemerintah dilakukan transparan, proporsional, dan akuntabel," katanya. Menurut dia, keterbukaan itu penting agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak merugikan masyarakat yang memanfaatkan TikTok sebagai media berekspresi.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, mendorong terbukanya kebebasan berekspresi setelah Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi membekukan sementara tanda daftar penyelenggara sistem elektronik (TDPSE) TikTok Pte Ltd. Dave berujar DPR mendorong penerapan kebijakan pemerintah yang kolaboratif dengan memperhatikan aspek kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara leluasa.

"Setiap regulasi harus tetap menjamin kebebasan berekspresi dan tidak mengekang ruang publik secara berlebihan," ucap Dave Sabtu (4/10/2025).

Politikus Partai Golkar itu mengatakan implementasi aturan, termasuk pembekuan TDPSE, harus berbasis prinsip kehati-hatian. Salah satu caranya adalah melibatkan para pemangku kepentingan, dari unsur pelaku industri, akademikus, hingga masyarakat sipil.

Dave juga memandang tindakan Komdigi itu menunjukkan pentingnya kepatuhan platform media sosial pada regulasi mengenai transparansi dan akuntabilitas pengelolaan data digital. Terutama, kata dia, di tengah situasi ricuh saat demonstrasi digelar di depan gedung DPR pada akhir Agustus lalu.

"Kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa platform digital, khususnya media sosial, memiliki dampak langsung terhadap stabilitas sosial dan keamanan informasi," ujarnya. (rls,ist,ant/lut)



# DPRD JAWA TIMUR INGATKAN PERLUNYA PERBAIKAN SISTEM PELAKSANAAN MBG



Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Makmullah Harun.



Anggota Komisi A DPRD Jatim, Sumardi.



Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim sekaligus Anggota Komisi E DPRD Jatim, Wara Sundari Renny Pramana.

**SURABAYA** — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sebagai salah satu program unggulan nasional kembali menjadi sorotan di Jawa Timur. Setelah munculnya kasus makanan basi dan keracunan yang dialami sejumlah siswa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengingatkan perlunya perbaikan sistem pelaksanaan agar manfaat program ini benar-benar dirasakan masyarakat, bukan justru menimbulkan masalah baru.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur sekaligus Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Wara Sundari Renny Pramana menilai, pengelolaan MBG ke depan sebaiknya diserahkan kepada pengelola kantin sekolah yang berjejaring langsung dengan UMKM lokal. Menurutnya, kantin sekolah memiliki pemahaman lebih baik terhadap kebutuhan siswa serta dapat menghadirkan menu yang sesuai dengan selera anak-anak sekaligus sehat dan aman dikonsumsi.

“Belajar dari kasus keracunan dan makanan basi dalam pelaksanaan program MBG, kami berharap agar ke depan pengelolaannya bisa diserahkan kepada pihak kantin sekolah. Kantin bisa bersinergi dengan UMKM di sekitar sekolah. Tentunya, yang paling paham karakter siswa adalah pihak kantin sekolah itu sendiri,” ungkap Renny, Minggu

(05/10/1015).

Lebih lanjut, Renny menegaskan bahwa keterlibatan kantin sekolah tidak hanya menjamin kualitas dan keberterimaan makanan oleh siswa, tetapi juga memberi dampak positif bagi ekonomi lokal.

“Kalau ibu-ibu kantin yang memasak, mereka tahu betul makanan apa yang disukai anak-anak. Ini bisa lebih sehat sekaligus memberdayakan ekonomi sirkular. Kantin sekolah bisa mendapatkan penghasilan tetap, UMKM sekitar ikut tumbuh, dan masyarakat mendapat manfaat ganda,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Jatim, Sumardi, menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar pelaksanaan MBG berjalan transparan. Menurutnya, Inspektorat harus dilibatkan secara aktif dalam fungsi pengawasan, mengingat program ini menyedot anggaran yang sangat besar.

“Anggaran besar ini harus dijaga transparansinya. Kita ingin manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, bukan justru menjadi masalah di kemudian hari. Karena itu, keterlibatan Inspektorat sangat diperlukan, paling tidak sebagai pengawas dan penyaring kegiatan ini,” tegas Sumardi.

Ia menambahkan, berdasarkan data terbaru, program MBG di Jawa

Timur sudah berjalan secara bertahap. Hingga akhir Agustus 2025, tercatat sekitar 1,9 juta penerima manfaat yang dilayani melalui 714 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Jumlah ini terus meningkat, dan pada 19 September 2025 sudah mencapai 2,7 juta orang penerima manfaat, dari target 10 juta orang di Jawa Timur.

Namun, realisasi ini belum diiringi dengan pemanfaatan anggaran daerah secara penuh. Dari sisi pendanaan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan alokasi Rp 800 miliar dalam APBD 2025, tetapi hingga kini penggunaannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat. Akibatnya, sebagian besar pelaksanaan MBG di Jawa Timur masih bertumpu pada dukungan langsung pusat melalui SPPG yang tersebar di berbagai daerah.

Di tingkat nasional, hingga September 2025 realisasi anggaran MBG baru mencapai Rp 13,2 triliun dari total pagu Rp 71 triliun. Meski cakupan penerima terus meluas, sejumlah laporan mengingatkan bahwa masalah kualitas pelaksanaan masih menghantui. Kasus keracunan dan munculnya makanan basi di beberapa daerah menunjukkan perlunya evaluasi serius, baik dari sisi distribusi, kebersihan, maupun aspek gizi.

Lebih lanjut, anggota Komisi A DPRD Jatim lainnya, Makmullah Harun, menilai bahwa program MBG sejatinya baik untuk mendukung generasi muda, tetapi pelaksanaannya tidak bisa dianggap sederhana. Menurutnya, menu makanan harus bervariasi agar siswa tidak bosan, dan aspek gizi harus dipastikan benar-benar dijalankan oleh tenaga profesional, bukan sekadar formalitas.

“Program ini bagus, tapi tidak serta-merta berjalan mulus. Pengelolaannya ternyata

rumit. Selera anak-anak juga perlu diperhatikan. Kalau menunya monoton, mereka bisa bosan. Dan kalau sampai ada keracunan, itu persoalan serius. Pemerintah sudah mewajibkan ada ahli gizi, jadi harus dipastikan mereka benar-benar menjalankan fungsinya, bukan hanya di atas kertas,” kata Makmullah.

Ia juga menyoroti soal pemerataan akses program di Jawa Timur. Menurutnya, daerah besar seperti Banyuwangi masih banyak sekolah yang menunggu giliran untuk mendapatkan layanan MBG secara penuh.

“Banyuwangi ini daerah besar, banyak sekolah yang berharap bisa menikmati program MBG. Jadi butuh pemerataan, jangan hanya sekolah tertentu yang terlayani dengan baik. Kalau distribusi dan kualitasnya dijaga, saya yakin program ini akan memberi manfaat besar bagi generasi ke depan,” tambahnya.

DPRD Jawa Timur secara umum mendukung pelaksanaan MBG sebagai bagian dari program strategis nasional. Program ini diyakini bisa menjadi instrumen penting untuk mengurangi stunting, memperbaiki gizi siswa, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional. Namun, dukungan itu diiringi dengan sejumlah catatan kritis yang harus segera dijawab oleh pemerintah. (adv,pra/lut)